

## Ketidaksesuaian Antara Realitas Sosial dan Nilai-Nilai Filsafat Pancasila

Ade Andreas Sinabariba<sup>1</sup>, Erika Putri Fadluna<sup>2</sup>, Glenn Kelty David Manurung<sup>3</sup>,  
Jonathan Martua Gultom<sup>4</sup>, Khaira Nazla<sup>5</sup>, Nurra Nianda<sup>6</sup>,  
Rizky Ramadhan Sibarani<sup>7</sup>, Ronasip Heppy Ria Sibarani<sup>8</sup>, Jamaludin<sup>9</sup>

Universitas Negeri Medan

E-mail: [adeandreass03@gmail.com](mailto:adeandreass03@gmail.com)<sup>1</sup>, [erikapufaa@gmail.com](mailto:erikapufaa@gmail.com)<sup>2</sup>, [gkelty.dm@gmail.com](mailto:gkelty.dm@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[jojogultom1008@gmail.com](mailto:jojogultom1008@gmail.com)<sup>4</sup>, [nazlakhaira911@gmail.com](mailto:nazlakhaira911@gmail.com)<sup>5</sup>, [niandanurra@gmail.com](mailto:niandanurra@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[kikisibarani2004@gmail.com](mailto:kikisibarani2004@gmail.com)<sup>7</sup>, [ronasibsibarani@gmail.com](mailto:ronasibsibarani@gmail.com)<sup>8</sup>, [jamaludin@unimed.ac.id](mailto:jamaludin@unimed.ac.id)<sup>9</sup>

### INFORMASI ARTIKEL

**Submitted** : 2023-09-25  
**Review** : 2023-09-25  
**Accepted** : 2023-10-25  
**Published** : 2023-11-01

### KATA KUNCI

*Filsafat, Pancasila.*

### A B S T R A K

*Ketidaksesuaian antara realitas sosial dan nilai-nilai filsafat Pancasila dalam lingkup mahasiswa adalah fenomena yang menciptakan tantangan dalam mewujudkan visi ideal negara Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis contoh konkret dari ketidaksesuaian ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam lingkungan mahasiswa, terdapat kasus-kasus ketidaksesuaian yang mencakup diskriminasi, intoleransi, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan-tindakan korupsi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidaksesuaian ini mencakup kurangnya pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila, perbedaan budaya, tekanan sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi. Temuan ini menyoroti perlunya pendekatan pendidikan moral yang lebih kuat dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari mereka. Upaya bersama dari perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat perlu diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Dengan demikian, negara Indonesia dapat memperkuat fondasi moral dan etika dalam perkembangan generasi muda untuk mencapai tujuan Pancasila sebagai panduan dalam membangun bangsa yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial.*

## **PENDAHULUAN**

Realitas sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari kadang tidak sesuai dengan harapan kebanyakan orang. Ketidakadilan, kekecewaan, ketidakpuasan sering dirasakan oleh masyarakat, terlebih terhadap penguasa yang berdampak pada kehidupan masyarakat luas bahkan juga terpuruknya kondisi bangsa. Sebagai salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat terhadap bangsa ini, masyarakat terdorong untuk menyampaikan kritikan yang konstruktif untuk membangun bangsa ini.

Pancasila, sebagai pilar filosofis utama Indonesia, menciptakan landasan ideologis bagi negara Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Sebagai suatu sistem nilai yang unik, Pancasila tidak hanya mencerminkan identitas nasional, tetapi juga berfungsi sebagai panduan moral dan sosial bagi masyarakat Indonesia. Dalam jurnal ini, kita akan menjelajahi peran penting Filsafat Pancasila sebagai ideologi negara, menyelusuri akar sejarahnya dan menganalisis dampaknya terhadap pembentukan kebijakan dan tatanan sosial.

Pancasila merupakan dasar falsafah negara republik Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 diatur oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila didirikan membimbing penyesuaian penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat Indonesia. Notonagoro dalam Rozikin, (1995:10) menjelaskan bahwa Pancasila adalah dasar Negara mempunyai kedudukan khusus dalam berbangsa dan bernegara (peraturan negara dasar). Selain menjadi dasar Negara, Pancasila juga Sumber segala sumber hukum dan pandangan hidup masyarakat Indonesia, juga Pancasila merupakan ruh/jiwa bangsa.

Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilihat dari pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Diktat Filsafat Pancasila (Danumihardja, 2011) menyatakan bahwa ia merupakan ontologi yang didasarkan pada refleksi terhadap negara, bangsa, masyarakat, dan umat manusia.

Penelitian ini akan membahas esensi dari setiap sila dalam Pancasila, diantaranya: keadilan sosial, persatuan Indonesia, demokrasi, dan lain-lain untuk memahami bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Juga menelusuri konteks politik dan sosial yang membentuk pembentukan Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan merunut sejarahnya, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang evolusi dan relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman modern.

Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan gambaran tentang kontribusi Filsafat Pancasila terhadap perkembangan politik, hukum, dan budaya Indonesia. Bagaimana filsafat ini memengaruhi pembuatan kebijakan dan bagaimana ia berinteraksi dengan sistem-sistem ideologi global. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga pada pemahaman lebih lanjut tentang peran Pancasila sebagai kekuatan pemersatu dan penuntun moral dalam negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meletakkan dasar pemahaman yang kokoh tentang Filsafat Pancasila sebagai ideologi negara, membuka jalan untuk analisis mendalam yang akan kita lakukan pada bagian selanjutnya dari jurnal ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang kami gunakan dalam artikel ini adalah mencakup studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (zed,2008:3).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas dan perekat bangsa Indonesia. Filosofi yang terkandung dalam Pancasila harus ditekankan dari sudut pandang yang holistik tentang realitas kehidupan bangsa yang majemuk. Hal ini menonjolkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat ini harus menjadi landasan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, ada kesatuan dalam keberagaman yang ada. Hal inilah yang disebut dengan Bhineka Tunggal Ika inti dari Filsafat Pancasila. Kerinduan bangsa Indonesia untuk mencapai kesatuan dalam menghayati keberagaman mencerminkan kerinduan umat manusia sepanjang zaman.

Pancasila hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan, pedoman, dasar hidup bangsa yang mengandung realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta dijadikan sebagai dasar dari penyelesaian masalah bagi manusia. Sebagaimana dikemukakan Abdulghani (1986), Pancasila sebagai sistem filsafat kemudian menjadi ideologi nasional yang menjadi pedoman masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dalam pendapat lain Sebagai sebuah sistem ideologi bangsa Wibisono (1996:3) menjelaskan pancasila mempunyai tiga unsur pokok didalamnya yaitu;

- 1) Rasionalitas,
- 2) Penghayatannya,
- 3) Kesusilaannya.

Pada Realitas Sosial Nilai-Nilai Filsafat Pancasila memiliki ketidaksesuaian, merujuk pada ketidakcocokan atau perbedaan antara nilai-nilai ideal atau prinsip yang terdapat dalam filsafat Pancasila dan realitas atau praktik yang terjadi dalam masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila, dalam kenyataannya, mungkin ada ketidaksesuaian di mana nilai-nilai ini tidak selalu tercermin atau diimplementasikan dengan baik dalam masyarakat atau dalam tindakan nyata.

Beberapa contoh ketidaksesuaian mungkin termasuk:

- 1) Ketidaksetaraan Sosial: Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial, tetapi dalam kenyataannya masih ada kesenjangan ekonomi dan sosial yang besar di masyarakat Indonesia.
- 2) Korupsi: Meskipun Pancasila mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan integritas, korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia.
- 3) Toleransi Agama: Pancasila mempromosikan toleransi agama, tetapi terkadang ada konflik antaragama dan intoleransi yang terjadi.
- 4) Hak Asasi Manusia: Ada masalah dengan pelanggaran hak asasi manusia di beberapa kasus, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai sarana mempersatu cita-cita negara dan masyarakat, perlu diwujudkan secara konkrit dan dapat diterapkan secara fungsional, agar tidak hanya dijadikan semboyan saja. Ketetapan MPR menyatakan bahwa Pancasila hendaknya dilaksanakan dalam kehidupan bernegara dalam bentuk penerapan yang konsekuen. Pada mulanya konsep Pancasila dapat dipahami sebagai landasan bersama berbagai ideologi politik yang berkembang di Indonesia pada masa itu. Pancasila merupakan tawaran yang mampu menutupi perbedaan ideologi anggota BPUPKI. Pancasila saat itu dirumuskan oleh Sukarno sebagai asas bersama agar seluruh

golongan di Indonesia dapat bersatu dan menerima asas tersebut. Menurut Adnan Buyung Nasution, telah terjadi perubahan fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai wadah demokrasi bagi seluruh golongan di Indonesia. Perkembangan doktrin Pancasila mentransformasikannya dari fungsi awal Pancasila sebagai wadah bersama ideologi-ideologi politik dan aliran-aliran menjadi ideologi yang komprehensif dan terpadu sesuai rumusan pertama yang dikemukakan oleh Sukarno. Ideologi Pancasila merupakan ideologi unik yang berbeda dengan ideologi lainnya. Keputusan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998, yaitu tentang pencabutan Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pedoman Pengakuan dan Pengamalan Pancasila serta Ketetapan Pendiriannya. Pancasila. Yayasan Negara Pancasila. . Pasal 1 Ketetapan MPR menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah landasan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan bernegara. Keputusan MPR tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional di Indonesia adalah kedudukannya sebagai landasan negara.

### **Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila**

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Prinsip ini adalah landasan pertama dari Pancasila dan menggarisbawahi pentingnya keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun Indonesia mengakui berbagai agama dan kepercayaan, prinsip ini menekankan bahwa semua agama dan kepercayaan patut dihormati dan tidak ada diskriminasi berdasarkan agama. Ini adalah contoh konkret dari semangat toleransi beragama yang mendasari negara Indonesia.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Prinsip kedua menyoroti komitmen Indonesia untuk memperlakukan semua warganya dengan adil dan beradab. Hal ini mencerminkan tekad untuk menghormati hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum. Prinsip ini juga mendorong negara untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan seni.
3. Persatuan Indonesia: Prinsip ini memandang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam. Dalam konteks Pancasila, ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tapi tetap satu), di mana perbedaan etnis, budaya, dan suku dihargai sebagai kekayaan bangsa. Prinsip ini mendorong solidaritas nasional dan perasaan kebangsaan.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan: Prinsip keempat adalah inti dari sistem demokrasi di Indonesia. Ini menegaskan bahwa kebijakan dan keputusan penting harus dibuat melalui perwakilan rakyat dan melalui proses musyawarah. Ini mencerminkan semangat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan menghindari otoritarianisme.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan. Negara berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara warganya. Hal ini mencakup upaya untuk memberikan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.

## **Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara**

### **1. Pemaknaan Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara**

Pemaknaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah penting dalam konteks penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila, sebagai dasar filsafat negara, mencerminkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi negara, politik, ekonomi, dan hukum. Dalam teks ini, Kaelan menjelaskan beberapa aspek penting terkait pemaknaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara:

- **Dasar Filsafat Negara:** Pancasila adalah dasar atau basis filosofi bagi negara dan sistem hukum Indonesia. Ini mencakup pandangan hidup dan filsafat hidup yang menjadi landasan nilai-nilai dalam berbangsa dan bernegara.
- **Asas Politik Kenegaraan:** Negara Indonesia berdiri di atas dasar Pancasila dengan asas politik kenegaraan berupa Republik yang berkedaulatan rakyat.
- **Basis Penyelenggaraan Kemerdekaan:** Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menjadi basis untuk penyelenggaraan kemerdekaan dan pengaturan negara.
- **Susunan Pemerintahan:** Di atas Undang-Undang Dasar, berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan peraturan hukum positif lainnya, yang berlandaskan asas kekeluargaan.
- **Tujuan Bersama:** Semua aspek di atas bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama, baik dalam aspek jasmani maupun rohani, sebagai tujuan bersama bangsa Indonesia dalam bernegara.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa semua aspek penyelenggaraan negara harus menjadi penjelmaan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Mengkaji pada beberapa aspek kehidupan bernegara yang berkaitan dengan pemaknaan Pancasila, diantaranya:

#### **a. Aspek Ekonomi**

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Namun, pengaturan ekonomi di Indonesia cenderung lebih mengedepankan aspek korporasi daripada aspek koperasi. Ini bertentangan dengan pemaknaan Pancasila yang seharusnya mengatur perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan.

#### **b. Aspek Politik**

Pancasila seharusnya menjadi landasan bagi sistem politik di Indonesia yang mengedepankan prinsip keadilan sosial, persatuan, musyawarah, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya politik yang memecah belah atau hanya menguntungkan satu golongan tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

#### **c. Aspek Hukum**

Pancasila ditempatkan sebagai cita hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini berarti bahwa Pancasila menjadi panduan tertinggi dalam pembentukan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Semua hukum di Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila.

Dengan demikian, pemaknaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk ekonomi, politik, dan hukum. Hal ini mengingatkan bahwa Pancasila bukan hanya semata-mata sebagai semboyan atau simbol, melainkan harus menjadi panduan nyata dalam setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara Indonesia.

## 2. Pancasila sebagai pandangan hidup

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memuat cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam nilai – nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai ini sesuai dengan lima asas utama Pancasila. Sila pertama, yang menyatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa," mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia harus mengakui keberadaan Tuhan, memenuhi kewajiban agama, dan menghormati keyakinan agama sesamanya. Sila kedua, yang berbicara tentang "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab," mencerminkan perlunya pengakuan terhadap kesetaraan manusia dan saling hormat-menghormati hak serta kewajiban setiap individu. Sila ketiga, yang mengungkapkan "Persatuan Indonesia," menegaskan pentingnya mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sila keempat, yang menyebut "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Khidmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menekankan perlunya memprioritaskan musyawarah dalam sistem demokratis negara. Sila kelima, yang berbicara tentang "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," mencerminkan tujuan bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

### Filsafat Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia

Filsafat Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merangkum serangkaian nilai dan prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan dan pengembangan negara. Pemahaman yang kokoh tentang Filsafat Pancasila melibatkan pengenalan mendalam terhadap lima asas utama yang membentuk ideologi ini:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa:  
Pemahaman yang kokoh menunjukkan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan agama dan spiritualitas, sambil tetap menekankan pada prinsip adanya Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi sebagai landasan moral dan etika.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:  
Pemahaman ini mencakup penghargaan terhadap hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan dalam hubungan sosial. Prinsip ini menuntut perlakuan adil dan beradab terhadap semua individu.
3. Persatuan Indonesia:  
Pemahaman yang solid tentang asas ini menekankan pentingnya persatuan nasional dalam keragaman. Ini mencakup penghargaan terhadap keberagaman budaya, etnis, dan agama, serta tekad untuk memelihara kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan:  
Pemahaman yang kuat melibatkan dukungan terhadap prinsip demokrasi, di mana keputusan nasional diambil melalui musyawarah dan perwakilan. Pemahaman ini menekankan pada kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang memenuhi kepentingan rakyat.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:  
Pemahaman tentang keadilan sosial menandakan kesediaan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ini melibatkan upaya untuk mendistribusikan kekayaan dan kesempatan secara adil.

Pemahaman yang kokoh tentang Filsafat Pancasila juga mencakup kesadaran akan sejarah dan konteks sosial yang membentuk ideologi ini. Selain itu, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kebijakan pemerintah, dan lembaga negara adalah bagian integral dari pemahaman yang mendalam tentang ideologi ini.

## **Pandangan Masyarakat Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari**

Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan setiap warga negara wajib mengingat dan menaati seluruh isi Pancasila. Namun mayoritas masyarakat Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara/ideologi tanpa mempertimbangkan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Jika masyarakat tidak menyadarinya, nilai-nilai penting yang terkandung dalam Pancasila sangatlah berguna dan bermanfaat (Nurgiansah, 2020).

Pandangan masyarakat terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia dapat bervariasi, tergantung pada latar belakang, pengalaman, dan perspektif individu. Masyarakat yang menghargai nilai-nilai Pancasila akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang adil dan beradab. Ini bisa tercermin dalam sikap dan tindakan yang mendukung hak asasi manusia, keberagaman, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Banyaknya penyimpangan/beberapa kesalahan yang terjadi sebenarnya bersumber dari tidak dilaksanakannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, pentingnya memahami Pancasila tidak hanya sekedar memahami tetapi juga mengamalkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti pendidikan karakter. Kebanyakan orang meremehkan makna yang terkandung dalam Pancasila. Penyimpangan yang terjadi pada hakekatnya disebabkan oleh kegagalan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada karakternya. Oleh karena itu, memaknai kandungan nilai-nilai Pancasila seperti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, solidaritas, kemasyarakatan dan keadilan merupakan hal yang harus dilakukan melalui pendidikan karakter agar manusia Indonesia menjadi manusia yang taat beragama, berperikemanusiaan, adil dan bermanfaat. rakyat untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, untuk Tanah Air dan untuk Negara.

## **SIMPULAN**

Pancasila adalah landasan negara yang berfungsi sebagai visi hidup bagi masyarakat Indonesia. Sebagai suatu pandangan hidup, Pancasila mencerminkan esensi, karakteristik, dan sumber hukum utama negara.

Filsafat Pancasila menjadi dasar ideologi negara di Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Pancasila diadopsi sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945, dan ini menjadi panduan bagi pembentukan sistem pemerintahan, hukum, dan kebijakan negara. Pancasila sebagai ideologi negara menunjukkan komitmen Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial. Filsafat Pancasila bukan hanya doktrin teoretis; ini juga mencerminkan nilai-nilai yang ingin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ini adalah panduan yang kuat bagi negara dalam mengambil kebijakan, menghormati hak-hak individu, menjaga keragaman budaya, dan memastikan bahwa keadilan dan demokrasi menjadi bagian integral dari tatanan sosial dan politik Indonesia.

Implementasi dan pemahaman terhadap Pancasila dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan antarindividu. Tetapi sebagai ideologi negara, Pancasila harus terus menjadi landasan penting dalam pembangunan dan identitas Indonesia, agar menjadi bangsa sejahtera yang tetap bertahan eksistensinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Danumihardja, Mintarsih. 2011. Filsafat Pancasila (Diktat Perkuliahan).
- Notonogoro. 1983. Pancasila Dasar Falsafah Negara, kumpulan tiga uraian pokokpokok persoalan tentang Pancasila, Cet kelima, Jakarta: Bina Akasara.
- Nurgiansah, T. H., Dewantara, J. A., & Rachman, F. (2020). The Implementation of Character Education in the Civics Education Syllabus at SMA Negeri 1 Sleman. *Jurnal Etika Demokrasi*, 5(2), 110–121.
- Rahardian, Aditya. (2022). Kajian Kemampuan Berpikir Kritis (Critical Thinking Skill) dari Sudut Pandang Filsafat. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(2), 87-94.
- Semadi, Y. P.(2020) FILSAFAT PANCASILA DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA MENUJU BANGSA BERKARAKTER. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(2), 82-89